

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
PATI**



TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma IV (Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Dhania Febby Zahira

40011419650295

**PROGRAM DIPLOMA IV (SARJANA TERAPAN)
AKUNTANSI PERPAJAKAN
DEPARTEMEN BISNIS DAN KEUANGAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Nama Penyusun : Dhania Febby Zahira
Nomor Induk Mahasiswa : 40011419650295
Fakultas : Sekolah Vokasi
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
PATI.

Semarang, Juni 2023
Dosen Pembimbing,

Drs. Agustinus Santosa Adibowo, M.Si
NIP: 19581010198603100

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dhania Febby Zahira

Nomor Induk Mahasiswa : 40011419650295

Fakultas : Sekolah Vokasi

Judul Tugas Akhir/Skripsi : **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
PATI**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji

1. Drs. Agustinus Santosa Adibowo, M.Si ()
2. Rissa Anandita, S.E., M.Ak., Ak., CA. ()
3. Clara Yully Diana Ekaristi, S.E., M.Acc. ()

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Dhania Febby Zahira, menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi dengan judul : “PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PATI” yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (S1 Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir/skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang diambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir/skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah tulisan hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

Dhania Febby Zahira
NIM.40011419650295

ABSTRAK

Tim peneliti meneliti bagaimana perubahan teknologi dan administrasi perpajakan mempengaruhi kecenderungan pengendara untuk melaporkan pajak mobil yang akurat di Kabupaten Pati. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat, sedangkan faktor bebas adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan. 100 peserta dari komunitas besar wajib pajak kendaraan bermotor menjadi sampel penelitian. Orang-orang ini semuanya terdaftar di UPTD Samsat Pati. Serratus pemilik kendaraan yang kendaraannya terdaftar di UPTD Samsat Pati dikirim survei. Data dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS 25. Regresi linear berganda adalah metode analisis yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengetahuan wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (2) kesadaran wajib pajak juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan (3) kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh modernisasi administrasi perpajakan.

Kata Kunci: *Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

The research team set out to examine how changes in technology and tax administration have influenced motorists' propensity to file accurate car tax returns in Pati Regency. Taxpayer compliance is the dependent variable, while taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and the modernization of tax administration are the independent variables. The study's sample size was 100 representatives of the larger Motor Vehicle Taxpayer population. 100 motorized vehicle taxpayers registered at UPTD Samsat Pati received questionnaires. In order to process the data, IBM SPSS 25 was used. This study uses multiple linear regression analysis as its analysis approach.

The study found that (1) taxpayer knowledge increases taxpayer compliance, (2) taxpayer awareness also increases taxpayer compliance, and (3) tax system modernization has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Compulsory knowledge of taxes, compulsory tax awareness, modernization of tax administration, and compliance with tax obligations.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang menyanggud judul ini. **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati”**. Untuk memperoleh gelar Diploma IV (Sarjana Terapan) dari Fakultas Vokasi Universitas Diponegoro, skripsi ini memenuhi syarat.

Penulis skripsi ini sangat menghargai bantuan dan saran dari semua pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang berikut dalam hal ini:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuat penyusunan tugas akhir/skripsi ini sederhana dan mudah.
2. Dekan Fakultas Vokasi Universitas Diponegoro beserta jajaran dan pembantu Dekan adalah Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si.
3. Fakultas Vokasi Universitas Diponegoro Semarang Bapak Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., sebagai Kaprodi Akuntansi Perpajakan pada Program Diploma IV.
4. Dosen wali yang telah membimbing penulis sepanjang setiap prosedur akademik adalah Bapak Marsono, SE., M.Adv.Acc.
5. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing skripsi saya, Dr. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.Si., atas semua bantuan dan arahnya selama proses berlangsung.

6. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro atas bantuannya dalam menyusun referensi ini.
7. Direktur dan staf SAMSAT PATI yang telah bersedia untuk diwawancarai dan dihubungi untuk penelitian sesuai topik skripsi saya.
8. Kedua orang tua penulis, saudara, keluarga besar, dan teman-teman, yang semuanya telah menjadi sumber inspirasi, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya selama penulisan skripsi ini.
9. Zaki Juno yang telah menjadi batu sandungan saya dalam melewati masa suka dan duka selama proses penulisan skripsi ini berada di urutan sembilan.
10. Sepuluh (atau lebih) orang yang membantu penulis selama penulisan skripsi. Jika anda tertarik, semoga tesis ini bermanfaat bagi anda.

Penulis mengakui bahwa terlepas dari upaya terbaiknya, tesisnya bukan tanpa kekurangan. Untuk alasan itu, kami sangat menyambut umpan balik dan saran Anda. Pembaca dan siapa pun yang tertarik harus menemukan nilai dalam tesis ini.

Semarang, Juni 2023

Dhania Febby Zahira

DAFTAR ISI

	Hal.
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori-Teori Variabel Penelitian	10
2.1.1 Teori Kepatuhan.....	10
2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory).....	11
2.1.3 Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behavior).....	12
2.1.4 Pajak.....	14
2.1.5 Pengetahuan Wajib Pajak.....	15
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	16
2.1.7 Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	17
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.2 Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu).....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23

2.4 Hipotesis Penelitian.....	24
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.4.3 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	27
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.4 Populasi dan Sampel	29
1. Populasi.....	29
2. Sampel.....	30
3.5 Data dan Sumber Data	31
3.6 Metode Pengumpulan Data	31
3.7 Analisis Data	32
3.7.1 Uji Kualitas Data.....	32
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	35
3.8 Uji Hipotesis	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum UPPD dan Samsat Pati	38
4.1.2 Visi dan Misi.....	39
4.2 Gambaran Umum Responden	40
4.2.1 Jenis Kelamin Responden	40
4.2.2 Tingkat Pendidikan Responden.....	41
4.3 Uji Instrumen Penelitian	41
4.3.1 Uji Validitas	41
4.3.2 Uji Reliabilitas	42
4.4 Uji Statistik Deskriptif	43
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	45

4.5.1	Uji Normalitas.....	45
4.5.2	Uji Multikolinieritas.....	46
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	47
4.6	Uji Hipotesis	47
4.6.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
4.6.2	Uji Koefisien Determinasi	49
4.6.3	Uji Statistik F	50
4.6.4	Uji Statistik T	51
BAB V PENUTUP.....		55
5.1	Simpulan	55
5.2	Saran.....	55
5.3	Keterbatasan Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA		57

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Samsat Pati Periode 2015-2017	3
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	40
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F.....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	61
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	65
Lampiran 3. Surat Balasan	67
Lampiran 4. Data Responden.....	68
Lampiran 5. Data Tabulasi.....	72
Lampiran 6. Uji Validitas.....	75
Lampiran 7. Uji Reliabilitas.....	75
Lampiran 8. Uji Deskriptif	76
Lampiran 9. Uji Normalitas	76
Lampiran 10. Uji Multikolinieritas	77
Lampiran 11. Uji Heteroskedastisitas	77
Lampiran 12. Uji Analisis Regresi Berganda & t.....	78
Lampiran 13. Uji F.....	78
Lampiran 14. Uji Koefisien Determinasi.....	78
Lampiran 15. Dokumentasi.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertekad menjamin setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang sama sebagai negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dilaksanakan untuk mewujudkan bangsa yang lebih adil dan makmur. Selain itu, Indonesia adalah negara berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan mengutamakan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melakukan upaya dengan melihat sumber penerimaan pajak (Rusmiyani & Supadmi, 2017).

Sumber utama pendanaan terbesar untuk pemenuhan kewajiban negara adalah pajak. Dalam APBN untuk Pendapatan dan Belanja Negara pada khususnya. Biaya yang terkait dengan pemerintahan umum dan pembangunan akan ditanggung seluruhnya oleh uang negara yang dikumpulkan melalui sistem perpajakan. Menurut Ilhamsyah dkk. (2016), ia berusaha untuk memecahkan masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kekayaan dalam masyarakat.

Sumber utama pendanaan terbesar untuk pemenuhan kewajiban negara adalah pajak. Dalam APBN untuk Pendapatan dan Belanja Negara pada khususnya. Biaya yang terkait dengan pemerintahan umum dan pembangunan akan ditanggung seluruhnya oleh uang negara yang dikumpulkan melalui sistem perpajakan. Menurut Ilhamsyah dkk. (2016), ia berusaha untuk memecahkan masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kekayaan dalam masyarakat.

Pemerintah terus melakukan sejumlah inisiatif untuk memungut pajak dari administrasi pajak serta elemen kebijakan dan sistem. Pemerintah akan memantau dan menjamin semua keringanan pajak digunakan secara maksimal. Pajak dipecah menjadi dua kelompok berbeda "pajak pusat" dan "pajak daerah" berdasarkan yurisdiksi yang bertanggung jawab untuk memungutnya. Pemerintah daerah mengelola dan mengumpulkan pajak daerah, sedangkan pemerintah federal mengumpulkan dan mengelola pajak pusat melalui pemungut pusat atau organisasi pelayanan pajak. Karena merupakan alat ukur pengumpulan pajak pemerintah daerah sendiri, pajak daerah merupakan sumber utama pendanaan pembangunan daerah (Barus, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah, lima jenis pungutan berikut oleh pajak daerah dan provinsi: Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). pajak dan biaya yang dikenakan oleh pemerintah negara bagian dan kota. Pemerintah kota sangat bergantung pada pendapatan yang dikumpulkan dari pajak daerah. Menurut Rusmiyani & Supadmi (2017), penerimaan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat penting untuk pembiayaan pembangunan daerah provinsi.

Inisiatif penggantian nama dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan segera berakhir, sehingga pemerintah menghimbau masyarakat untuk membayar pajak sekarang juga. Hanindyatama, Kepala UPPD Kabupaten Pati, mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mensosialisasikan program pemutihan ini. Kalaupun dana pajak akan

dikembalikan untuk pembangunan daerah, masih rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak, klaimnya. Alhasil, pihaknya terus mensosialisasikan kepada warga Kabupaten Pati tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu guna mendukung perekonomian daerah. Pada tahun 2017 (PatiNews.com, 2017), tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Pati mencapai puluhan miliar rupiah.

Penerimaan pajak Samsat Pati kendaraan bermotor turun akibat keterlambatan pembayaran. Tabel 1.1 menampilkan, untuk tahun 2015 sampai dengan 2017, jumlah wajib pajak dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor Samsat Pati.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Samsat Pati Periode 2015-2017

NO	Tahu Jatuh Tempo	Database		Total
		Roda 4 atau lebih	Roda 2	
1	2017	17.006	1.154	18.160
2	2018	16.288	1.455	17.743
3	2019	18.423	1.976	20.399
4	2020	28.608	3.931	32.539
5	2021	54.453	7.724	62.177

Sumber: Kantor UPPD dan Samsat Pati

Berdasarkan data di atas, persentase pemilik kendaraan bermotor dan jumlah tunggakannya mengalami kenaikan selama tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak adalah 18.160 pada tahun 2018 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak adalah 17.743, pada tahun 2019 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak adalah 20.399, pada taun 2020 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang

menunggak adalah 32.539, pada tahun 202 adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak adalah 62.177.

Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemilik kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan pembayaran pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Dalam konteks data di atas, wajib pajak kendaraan bermotor yang gagal membayar pajak secara tepat waktu dapat dikenai sanksi administrasi perpajakan.

Sanksi administrasi perpajakan yang mungkin dikenakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Ketika seorang wajib pajak mengalami tunggakan pajak, mereka dapat dikenai denda berupa tambahan nilai tertentu atas jumlah pajak yang belum dibayar. Selain itu, wajib pajak juga mungkin dikenai sanksi bunga atas tunggakan tersebut, yang berarti mereka harus membayar bunga atas jumlah pajak yang belum dibayarkan selama periode keterlambatan. Sanksi kenaikan dapat berarti adanya penambahan jumlah tunggakan pajak secara proporsional dari waktu ke waktu. Data menunjukkan bahwa selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak mengalami kenaikan yang signifikan. Peningkatan ini mungkin mencerminkan penerapan sanksi kenaikan oleh pihak berwenang sebagai upaya untuk mendorong wajib pajak agar segera membayar pajak yang belum terbayarkan.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, penerapan sanksi administrasi perpajakan menjadi penting sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian atas pemilik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi ini diharapkan dapat mendorong para wajib pajak untuk secara tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terlihat dari naiknya tunggakan PKB dan turunnya jumlah wajib pajak yang membayar PKB. Ketika unsur-unsur ini tidak ada dalam pelayanan, wajib pajak memutuskan untuk mengabaikan kepatuhan. Hal ini perlu dicermati agar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Pati bisa mendatangkan uang lebih banyak. Mematuhi undang-undang perpajakan berarti menggunakan hak perpajakannya dengan cara yang sah dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh (Ilhamsyah, et al., 2016). Karena kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk keberhasilan sistem perpajakan secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan pajak akan menghasilkan peningkatan pemungutan pajak. Akibatnya, pendapatan pajak akan memenuhi dan mungkin melebihi harapan. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting (Wardani & Rumiya, 2017).

Menurut kajian kepatuhan administrasi perpajakan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya (Oktaviani, 2018; Rohmah, 2020), Kepatuhan wajib pajak meningkat setelah modernisasi administrasi pajak diperbarui. Menurut Antari dan Supadmi (2019), wajib pajak lebih cenderung mematuhi hukum setelah

modernisasi.

Studi baru menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kualitas layanan, dan pengetahuan pajak semuanya memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak (Akbar, 2019), memberikan kepercayaan pada studi-studi sebelumnya.

Artiryani (2019) mendefinisikan "sosialisasi perpajakan" sebagai "inisiatif untuk mengedukasi wajib pajak dan calon wajib pajak tentang semua aspek peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk peraturan dan prosedur perpajakan, dan untuk mempromosikan bimbingan dan pengetahuan wajib pajak."

Selain itu, dikemukakan oleh Anwar dan Syafiqurrahman (2016) serta Alverina (2000) bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepuasan pelanggan tidak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh diskusi publik tentang masalah pajak dan sosialisasi wajib pajak.

Tidak ada bukti bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk mengikuti hukum (Wardani & Kartikasari, 2020; Pratama & Kurnia, 2022). Jika pembayar pajak tidak memiliki tingkat pemahaman dan keinginan tertentu untuk membayar pajak, tidak ada penelitian termasuk penelitian lain yang dapat memastikan bahwa mereka akan patuh (Arifin, 2015).

Karena kondisi perekonomian tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari fenomena sosial yang muncul pada masa administrasi perpajakan, khususnya di Kabupaten Pati. Untuk memahami bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penulis akan melihat modernisasi administrasi perpajakan, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Judul proyek

penelitian “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati” menunjukkan ketertarikan penulis terhadap variabel-variabel tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut mengingat konteks tersebut diatas:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengkaji bagaimana pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas modernisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.
3. Untuk mengkaji bagaimana kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat berikut dari penelitian ini diantisipasi, berdasarkan bagaimana tantangan tersebut dirumuskan diatas:

1. Bagi peneliti. Kajian ini diharapkan dapat mengedukasi para akademisi mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan kendaraan bermotor di samping menjelaskan kesadaran, pemahaman, dan kemajuan administrasi perpajakan wajib pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait dan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kesadaran wajib pajak serta memodernisasi administrasi perpajakan di Kabupaten Pati.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana bagi para akademisi untuk lebih mendalami perpajakan dan keterkaitan antara pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan agar penelitian tersusun runtut dan sistematis secara keseluruhan sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam riset ini tersaji dalam:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjabarkan gambaran Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, juga Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan Landasan Teori yang melandasi penelitian, Kerangka Berpikir dan Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi langkah-langkah dalam melakukan penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan proses awal pengolahan data sampai didapatkan interpretasi hasil yang meliputi Deskripsi Objek Penelitian dan Analisis Data.

BAB V Penutup

Bab ini menyajikan Kesimpulan, Saran dan keterbatasan dari penelitian yang sudah dijabarkan.